

STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

SHINTA IRYANINGSIH



ILMU PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 4 Agustus 2026

Shinta Iryaningsih
P0502222044

RINGKASAN

SHINTA IRYANINGSIH. Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dibimbing oleh HARTRISARI HARDJOMIDJOJO dan SAMBAS BASUNI.

Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan kebijakan pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sekitar kawasan sebagai pelaku utama. Kabupaten Garut memiliki kawasan hutan ± 103.543 hektar atau $\pm 33\%$ dari total wilayah kabupaten, termasuk dalam Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) untuk kepentingan PS yang dapat diberikan akses kelola kepada masyarakat. Sampai dengan Desember 2025, terdapat 54 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) seluas ± 14.108 hektar yang melibatkan sebanyak 7.943 Kepala Keluarga (KK) dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang belum bertransformasi. Luasan akses kelola yang besar belum diiringi dengan kemajuan kualitas pengelolaan yang sepadan, sementara kontribusi pendapatan dari areal PS rata-rata hanya mencapai $\pm 28\%$ dari total pendapatan rumah tangga KPS. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis kondisi PS secara sistematis, analisis potensi pengembangan dan kelayakan finansial model usaha PS, serta perumusan strategi pengembangan program PS yang mendasari penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi PS di Kabupaten Garut melalui kondisi pengelolaan KPS, menganalisis potensi pengembangan PS di Kabupaten Garut melalui potensi areal kelola KPS dan kelayakan finansial model usaha PS, serta merumuskan strategi pengembangan program PS di Kabupaten Garut berdasarkan kondisi dan potensi pengembangan PS. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2026 pada populasi 54 KPS, dengan data primer dikumpulkan dari 15 KPS yang dipilih secara *purposive sampling*. Kondisi pengelolaan KPS dianalisis menggunakan indeks komposit tertimbang berbasis pemenuhan aspek (*weighted composite index*) yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mencakup aspek administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi. Potensi pengembangan areal pada seluruh 54 KPS dianalisis melalui skoring berbasis data spasial dengan parameter kelerengan, fungsi kawasan, aksesibilitas jalan, dan kedekatan dengan permukiman. Kelayakan finansial dianalisis menggunakan *Net Present Value* (NPV), *Benefit-Cost Ratio* (BCR), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Break-Even Point* (BEP) dengan proyeksi arus kas selama 20 tahun, tingkat diskonto sebesar 6%, serta menggunakan skenario konservatif dan optimistis. Perumusan strategi pengembangan menggunakan Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE), Matriks Internal-Eksternal (IE), Matriks *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT), serta *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) untuk menetapkan prioritas strategi.

Kondisi pengelolaan KPS contoh dipilih secara *purposive sampling* berada pada kelas Baik dengan indeks rata-rata 3,09; nilai ini berlaku untuk 15 KPS contoh dan tidak dimaksudkan sebagai estimasi statistik bagi seluruh 54 KPS. Aspek administrasi mencatat indeks tertinggi sebesar 3,52, sedangkan aspek ekonomi mencatat indeks terendah sebesar 2,51. Kesenjangan tersebut mencerminkan bahwa KPS mampu memenuhi persyaratan dokumen dengan hampir sempurna, tetapi belum



mampu membangun sistem usaha secara maksimal. Aspek kepatuhan ekologis berdasarkan indikator yang digunakan menunjukkan capaian relatif tinggi dan merata pada rentang 2,88 sampai dengan 3,57. Seluruh KPS belum melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hanya sembilan dari 15 KPS yang memiliki keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Distribusi kelas menempatkan tiga KPS pada kelas Sangat Baik, sepuluh KPS pada kelas Baik, dan dua KPS pada kelas Sedang, tanpa satu pun KPS pada kelas Kurang. Dua KPS pada kelas Sedang merupakan kelompok yang belum bertransformasi dari Kulin KK dan IPHPS menjadi HKm atau HD.

Potensi pengembangan areal pada seluruh 54 KPS terdistribusi tidak merata. Sebanyak 48 KPS atau 88,9% berada pada kelas Sedang–Tinggi sampai dengan Sangat Tinggi dan tersebar di 20 kecamatan, sedangkan skor tertinggi terkonsentrasi pada 13 KPS di koridor Cisurupan–Pasirwangi–Cikajang. Ketiga belas KPS tersebut mencakup kelas Sangat Tinggi dan identik dengan Klaster Wilayah Prioritas 1 dalam *Master Plan* Pengembangan Wilayah Terpadu (*Integrated Area Development* – IAD) Kabupaten Garut. Usaha agroforestri kopi arabika layak dikembangkan secara finansial pada kedua skenario. Skenario konservatif menghasilkan NPV sebesar Rp60.047.310 per hektar, BCR sebesar 1,19, IRR sebesar 15,1%, dan BEP harga Rp53.000 per kilogram, sedangkan skenario optimistis menghasilkan NPV sebesar Rp515.507.577 per hektar, BCR sebesar 2,61, IRR sebesar 58,3%, dan BEP harga Rp33.125 per kilogram. Selisih hasil yang mencapai sekitar 8,6 kali lipat antara kedua skenario bersumber dari perbedaan produktivitas dan akses pasar, menunjukkan bahwa kendala terletak pada rantai pasok dan bukan pada kelangsungan usaha.

Skor IFE sebesar 2,750 dan EFE sebesar 2,590 menempatkan program PS di Kabupaten Garut pada Sel V Matriks IE dengan strategi *hold and maintain*, yaitu pendalaman kualitas KPS yang sudah ada dibandingkan dengan penambahan jumlah KPS atau luas areal PS. Prioritas strategi ditetapkan melalui QSPM berdasarkan *Total Attractiveness Score* (TAS), menghasilkan urutan: penguatan klaster komoditas unggulan pada episentrum IAD (TAS 5,750), fasilitasi akses permodalan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (TAS 5,520), transformasi kelembagaan dan perlindungan areal kelola untuk KPS rentan (TAS 4,360), serta penguatan tata batas areal kelola KPS dan ketahanan produksi (TAS 4,160). Keempat strategi membentuk satu kesatuan intervensi yang saling memperkuat, dengan kejelasan batas kawasan dan ketersediaan modal sebagai prasyarat agar pengembangan klaster tidak hanya menguntungkan kelompok yang sudah kuat.

Kata kunci: indeks komposit tertimbang, Kabupaten Garut, perhutanan sosial, skoring spasial, strategi pengembangan program.

SUMMARY

SHINTA IRYANINGSIH. Development Strategy of Social Forestry Program in Garut Regency, West Java Province. Supervised by HARTRISARI HARDJOMIDJOJO and SAMBAS BASUNI.

The Social Forestry program (PS) positions communities surrounding forest areas as the principal actors in forest management. Garut Regency holds $\pm 103,543$ hectares of forest area, or $\pm 33\%$ of its total territory, including areas designated as Forest Area with Special Management (KHDPK) allocated for social forestry, where management access may be granted to local communities.

As of December 2025, there were 54 Social Forestry Groups (KPS) managing $\pm 14,108$ hectares and involving 7,943 households under the schemes of Village Forest (HD), Community Forest (HKm), as well as Recognition and Protection of Forestry Partnership (Kulin KK) and Social Forestry Utilization Permit (IPHPS) that have not yet been transformed. Extensive management access has not been accompanied by a proportional improvement in management quality, while income from social forestry areas contributes an average of only $\pm 28\%$ of the total member household income. A systematic analysis of social forestry management conditions, an assessment of area potential, and the formulation of a development strategy therefore constitute the basis of this study.

This study aimed to analyze the management conditions of KPS, assess area potential along with the financial feasibility of the social forestry business model, and formulate a development strategy for the social forestry program in Garut Regency, West Java Province. The research was conducted from January to June 2026 on a population of 54 KPS, with primary data collected from 15 KPS selected through purposive sampling. Management conditions were analyzed using a weighted composite index based on aspect fulfillment, adapted from the Minister of Environment and Forestry Decree Number 1091 of 2024 regarding the Mechanism for Developing Social Forestry Management, covering administrative, ecological, social, and economic aspects. The area potential of 54 KPS was assessed through spatial data scoring using the parameters of slope, forest function, road accessibility, and settlement proximity. Financial feasibility was analyzed using Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), and Break-Even Point (BEP), with cash flow projected over 20 years at a discount rate of 6% under conservative and optimistic scenarios. The development strategy was formulated using the Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) matrices, the Internal-External (IE) matrix, Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis, and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to prioritize the strategies.

The management conditions of the 15 sampled KPS were categorized as Good, with an average index of 3.09. The administrative aspect showed the highest index at 3.52, while the economic aspect recorded the lowest at 2.51, producing a gap of 1.01. This gap indicates that groups can fulfill documentary requirements almost perfectly yet have not been able to develop business systems optimally. The ecological aspect showed high and even scores ranging from 2.88 to 3.57, and therefore no longer represents a weakness of management. None of the KPS had paid Non-Tax State Revenue (PNBP), and nine of the 15 KPS had women represented in their

management. The class distribution placed three KPS in the Very Good class, ten KPS in the Good class, and two KPS in the Fair class, with none in the Poor class. The two KPS in the Fair class are those that have not yet transformed from Kulin KK and IPHPS into HKm or HD.

The potential for area development managed by all 54 KPS was unevenly distributed. The amount of 48 KPS, or 88.9%, fell within the Moderate–High to Very High class and were spread across 20 districts, while the highest scores were concentrated in 13 KPS along the Cisurupan–Pasirwangi–Cikajang corridor. These 13 KPS comprise the Very High class, which lies within the Priority Area Cluster 1 of the Integrated Area Development (IAD) Master Plan of Garut Regency. Arabica coffee agroforestry is financially feasible to be developed under both scenarios. The conservative scenario yields an NPV of IDR 60,047,310 per hectare, a BCR of 1.19, an IRR of 15.1%, and a BEP price of IDR 53,000 per kilogram, while the optimistic scenario yields an NPV of IDR 515,507,577 per hectare, a BCR of 2.61, an IRR of 58.3%, and a BEP price of IDR 33,125 per kilogram. Around an 8.6-fold difference between the two scenarios arose from differences in productivity and market access, indicating that the constraint lies in the supply chain rather than in enterprise viability.

An IFE score of 2.750 and an EFE score of 2.590 placed the social forestry program of Garut Regency in Cell V of the IE Matrix, corresponding to a hold and maintain strategy that deepens the quality of existing KPS rather than increasing the number of groups or the extent of the areas. Strategy priorities were determined through QSPM based on the Total Attractiveness Score (TAS), yielding the following order: strengthening priority commodity clusters in the IAD epicenter (TAS 5.750), facilitating access to financing and strengthening human resource capacity (TAS 5.520), institutional transformation and protection of managed areas for vulnerable KPS (TAS 4.360), and strengthening KPS managed-area boundaries and production resilience (TAS 4.160). These four strategies form an integrated set of mutually reinforcing interventions, in which clear area boundaries and the availability of capital serve as prerequisites so that cluster development does not benefit only the already-strong groups.

Keywords: development strategy, Garut Regency, social forestry, spatial scoring, weighted composite index



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

@Hak cipta milik IPB University

SHINTA IRYANINGSIH

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister pada
Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

**ILMU PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Penguji pada Ujian Tesis:
Dr. Soni Trison, S.Hut, M.Si, IPU.



Judul Tesis : Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial di
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Nama : Shinta Iryaningsih
NIM : P0502222044

@Hak cipta milik IPB University

Disetujui oleh

Pembimbing 1:

Prof. Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, D.E.A.

Pembimbing 2:

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:

Prof. Dr. Efi Yulianti Yovi, S.Hut., M.Life.Env.Sc.
NIP. 19740724 199003 2 003

Dekan Sekolah Pascasarjana:

Prof. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc.
NIP. 19660728 199103 1 002

Tanggal Ujian:
4 Agustus 2026

Tanggal Pengesahan Tesis:
13 Agustus 2026



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala karunia-Nya, karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2026 ini adalah penguatan tata kelola, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan hutan dengan judul “Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat”. Karya ilmiah ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, Prof. Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, D.E.A. dan Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S. yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan, masukan, dan motivasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada moderator seminar, penguji luar komisi pembimbing, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan. Penghargaan turut penulis sampaikan kepada Institut Pertanian Bogor, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Balai Perhutanan Sosial Bogor, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Garut, *Forest Programme V*, serta Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut yang telah membantu kebutuhan data dan informasi selama penelitian berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu dan keluarga besar, serta mahasiswa/i Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang telah memberikan dukungan dan do’a.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya di bidang yang relevan.

Bogor, 4 Agustus 2026

Shinta Iryaningsih



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Kerangka Pikir	4
II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perhutanan Sosial di Indonesia	6
2.2 Analisis Kondisi Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	8
2.3 Analisis Potensi Areal Kelola Kelompok Perhutanan Sosial	11
2.4 Analisis Kelayakan Finansial Model Usaha Perhutanan Sosial	16
2.5 Analisis Strategi dengan Matriks Internal-Eksternal (IE) dan SWOT	19
2.6 Penelitian Terdahulu	23
III METODE PENELITIAN	26
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2 Alat dan Bahan	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Metode Penentuan Sampel	28
3.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.6 Metode Analisis Data	30
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Kondisi Umum Kabupaten Garut	39
4.2 Kondisi Pengelolaan KPS di Kabupaten Garut	40
4.3 Potensi Areal Kelola dan Kelayakan Finansial Model Usaha PS	47
4.4 Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial Kabupaten Garut	58
V SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	78
RIWAYAT HIDUP	101



DAFTAR TABEL

1	Matriks tujuan, jenis data, sumber data, metode analisis, dan luaran penelitian	27
2	Matriks tujuan, jenis data, sumber data, metode analisis, dan luaran penelitian (lanjutan)	28
3	Bobot aspek penilaian kondisi pengelolaan KPS	31
4	Kategori kelas kondisi pengelolaan KPS berdasarkan nilai indeks	32
5	Skenario pembobotan untuk analisis sensitivitas	32
6	Parameter dan bobot skoring potensi areal kelola KPS	33
7	Indeks kondisi pengelolaan KPS contoh	40
8	Indeks kondisi pengelolaan KPS contoh (lanjutan)	41
9	Rata-rata capaian aspek ekologi pada KPS contoh	42
10	Rata-rata capaian aspek sosial pada KPS contoh	43
11	Rata-rata capaian aspek ekonomi pada KPS contoh	44
12	Hasil analisis sensitivitas terhadap kondisi pengelolaan KPS contoh	46
13	Distribusi KPS berdasarkan skema dan karakteristik kawasan	48
14	Skor potensi areal kelola KPS	48
15	Skor potensi areal kelola KPS (lanjutan)	49
16	Skor potensi areal kelola KPS (lanjutan)	50
17	Distribusi skor potensi areal kelola KPS	51
18	Sebaran jenis tutupan lahan pada areal kelola KPS	52
19	Rekomendasi bentuk pengelolaan areal kelola KPS	52
20	Asumsi dan parameter analisis kelayakan finansial model usaha PS	53
21	Asumsi dan parameter analisis kelayakan finansial model usaha PS (lanjutan)	54
22	Arus kas usaha kopi arabika skenario konservatif (per hektar)	54
23	Arus kas usaha kopi arabika skenario optimistis (per hektar)	54
24	Arus kas usaha kopi arabika skenario optimistis (per hektar) (lanjutan)	55
25	Hasil analisis kelayakan finansial usaha agroforestri kopi arabika	55
26	Sebaran KPS dan capaian dimensi Indeks Desa tahun 2025	56
27	Rata-rata dimensi Indeks Desa menurut kecamatan tahun 2025	56
28	Rata-rata dimensi Indeks Desa menurut kecamatan tahun 2025 (lanjutan)	57
29	Matriks <i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE)	58
30	Matriks <i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE) (lanjutan)	59
31	Matriks <i>External Factor Evaluation</i> (EFE)	59
32	Matriks <i>External Factor Evaluation</i> (EFE) (lanjutan)	60
33	Matriks <i>Quantitative Strategic Planning Matrix</i> (QSPM) pengembangan program PS	63
34	Matriks <i>Quantitative Strategic Planning Matrix</i> (QSPM) pengembangan program PS (lanjutan)	64
35	Prioritas pengembangan program PS berdasarkan QSPM	67

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka pikir penelitian	5
2	Peta wilayah administratif dan sebaran KPS di Kabupaten Garut	26
3	Peta sebaran potensi areal kelola KPS di Kabupaten Garut	51
4	Matriks Internal-Eksternal (IE) pengelolaan PS di Kabupaten Garut	60
5	Matriks SWOT pengembangan program PS di Kabupaten Garut	61

DAFTAR LAMPIRAN

1	Daftar Populasi Penelitian	79
2	Daftar Sampel Penelitian	81
3	Hasil Analisis Tutupan Lahan	82
4	Kuesioner	86